

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengesahan Undang-Undang Nomor Pemerintahan Desa telah mengalami perubahan signifikan akibat UU 6 Tahun 2014. Diharapkan desa akan mandiri. Ini menyiratkan bahwa kota-kota dapat mengembangkan wilayahnya sesuai dengan kapasitasnya dan dapat menggantikan kerabatnya melalui upaya yang telah diubah oleh otoritas Publik. Pemerintah desa harus dapat merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi program-program tersebut ketika dana dari desa disalurkan. Banyak penduduk pedesaan mencari pekerjaan di kota. Sejak di kota saja mereka mendapat upah untuk membantu keluarganya. Bisnis genetika di kota, seperti di perkebunan teh, ditinggalkan oleh mereka. Hanya tersisa beberapa pemetik teh tua yang tenaga kerjanya sudah tidak bisa diandalkan lagi. Paradigma itu harus diubah oleh desa. Anggapan bahwa desa mandiri adalah desa yang mampu melaksanakan program dana desa yang dicanangkan pemerintah, yang terdiri dari empat prioritas pembangunan di desa: lapangan olah raga, tambak desa, produk unggulan, BUMDes, dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Keempat prioritas tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha masyarakat. Proyek-proyek ini dapat mencegah urbanisasi, dan kota-kota dapat menyelidiki kekurangan potensi, atau mendorong organisasi yang ada, misalnya kebun teh.

(Jumiati & Adam, 2020) menyatakan bahwa: Lima tahapan pembangunan ekonomi pedesaan adalah sebagai berikut: 1) berkonsentrasi pada

atribut kota; 2) Mengidentifikasi teknologi; 3) Industri potensial; 4) Teknik; apalagi 5) ujian institusional. Sifat-sifat desa sangat berbeda, sehingga pekerjaan mereka juga sangat beragam mulai dari peternak, petani, pemancing, rumah bangsawan, dan mempengaruhi pendapatan daerah setempat dan seberapa baik daerah tersebut menggunakan sumber daya alam. Keberhasilan pembangunan desa saat ini ditentukan oleh teknologi. Langkah selanjutnya adalah menerapkan strategi yang mampu mengembangkan sektor-sektor ekonomi setelah terlebih dahulu menentukan teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut.

Eksekusi program toko kota adalah salah satu teknik untuk menciptakan organisasi yang dapat bekerja pada ekonomi jaringan pedesaan dengan cara yang unggul. Persoalannya, banyak desa yang terus kekurangan produk unggulan desa. pemberdayaan masyarakat dengan memberikan penyuluhan cara mengolah sumber daya alam untuk mendirikan usaha mikro, berkembang menjadi usaha mikro, atau UMKM belum menghasilkan barang unggulan. Biaya pembuatan dan kemajuan dapat dikerjakan bersama dengan Usaha yang Diklaim Kota. Persoalannya, banyak desa yang tidak memiliki BUMDes sama sekali atau memilikinya, tetapi tidak berfungsi dengan baik. Pembangunan desa meliputi infrastruktur produksi energi terbarukan, ketahanan pangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

Upaya peningkatan kawasan lokal telah diselesaikan oleh Pemerintah Kota baik dengan adanya cadangan kota. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk membahas

pembangunan yang progresif, efisien, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat diajak untuk berpartisipasi tidak hanya dalam perencanaan pembangunan desa tetapi juga dalam pelaksanaannya. Masyarakat menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur desa dalam setting ini. Dari kegiatan tersebut masyarakat setempat juga akan mendapatkan kompensasi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, (Nadia, 2021).

Dana desa adalah dana yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan diperuntukan bagi desa. Aset ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan perbaikan, pemajuan kawasan, dan penguatan kawasan kota. Berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Partisipasi swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat didukung dengan pemanfaatan dana desa sebagai dana stimulan dan insentif perluasan pembangunan desa. Diharapkan pengelolaan keuangan dana desa mengikuti semua prinsip, karena dana desa tidak dapat dikelola secara mandiri dari APBDes. Penggunaan dana desa juga harus berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan desa, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan. Konsekuensinya, harus tertib dan terkendali anggaran, (M Dina Banurea, 2018).

Dana desa memungkinkan desa untuk mengelola pembangunan mereka sendiri dan memberdayakan masyarakat mereka sendiri. Kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat akan meningkat jika dana desa dimanfaatkan secara efektif dan intensif. Pengurangan ketimpangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat desa merupakan tujuan dari peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai oleh dana desa.

Gagasan dibalik Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara adalah bahwa desa yang merupakan soko guru otonomi daerah semakin membutuhkan pendanaan yang berimbang agar dapat berperan lebih signifikan dalam pembangunan daerah. Keluarnya kebijakan dana desa yang lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan meningkatkan keterlibatan masyarakat, seperti perbaikan jalan agar lebih mudah diakses, berdampak langsung pada masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan keinginan masyarakat untuk lebih berkonsentrasi pada pembangunan fisik guna memudahkan setiap masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Dalam hal ini berpotensi untuk mengubah masyarakat menjadi desa yang sejahtera dan desa yang memenuhi harapan setiap warga desa. terkait dengan kebijakan pemerintah daerah mengenai pemanfaatan dana desa secara optimal dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing desa, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Dengan cara ini, pergantian peristiwa aktual dan kemajuan non-aktual harus disinergikan sehingga tujuan fundamental perbaikan dapat tercapai. Pembangunan fisik dan non fisik diupayakan secara intensif seiring dengan perubahan sejarah. Sarana dan prasarana diperlukan untuk pembangunan non fisik seperti pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tanah dan material yang diambil dari

permukaan bumi diperlukan untuk membangun sarana dan prasarana tersebut. Alhasil, perkembangan ini tak lepas dari ruang angkasa yang mengelilingi Bumi. Gerakan, interaksi, difusi, dan aliran adalah semua aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang membutuhkan ruang. Itu tidak dapat memenuhi persyaratan untuk pengembangan tanpa ruang pengembangan ini.

Ketika membahas isu-isu terkait pembangunan, pembangunan infrastruktur tidak mungkin dipisahkan dari pembahasannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat pembangunan, termasuk pembangunan pertanian dan perdesaan. Di beberapa bagian tanah air masih terdapat ribuan desa dengan kondisi yang sangat berbeda dengan kota-kota yang kaya akan sumber daya, seperti desa-desa di Distrik Tanalili. Perbaikan kerangka kerja adalah salah satu sudut penting dan tak tergantikan untuk mempercepat pergantian peristiwa publik. Selain itu, infrastruktur merupakan kontributor yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingatkan bahwa kecepatan dan perkembangan perekonomian suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, komunikasi penyiaran, desinfeksi, dan energi. Oleh karena itu, peningkatan area ini menjadi alasan pergantian peristiwa keuangan tambahan.

Menurut Sintia (2019), pemerintah menjamin setiap desa mendapatkan hibah yang dikenal dengan Dana Desa. Pelaksanaan Pembagian Aset Kota (Include) Kota Tana Lili Lokal bergantung pada kenyataan bahwa sebagai andalan kemandirian wilayah, Kota semakin membutuhkan pembiayaan yang disesuaikan untuk menjalankan pekerjaan yang lebih nyata di pergantian provinsi. Efek

selektif yang dirasakan oleh masyarakat adalah lahirnya strategi cagar kota yang lebih berpusat pada perbaikan struktur, membuat masyarakat lebih suportif, misalnya dalam hal membangun jalan, mampu mempermudah peternak untuk dengan mudah menjangkau jalanan.

Keinginan masyarakat untuk lebih berkonsentrasi pada pembangunan fisik guna meningkatkan kesempatan kerja tercermin dalam kebijakan ini. Hal ini berpotensi mewujudkan desa yang memenuhi harapan setiap warga desa dan menjadikan masyarakat sejahtera seperti warga desa. Hal ini sesuai dengan strategi Pemda Luwu Utara dalam pemanfaatan aset kota secara ideal dengan menggunakan kebutuhan setiap kabupaten/kota baik dalam pembenahan pondasi maupun penguatan kawasan setempat., (Nadia, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Dimana dana desa merupakan hal utama dalam menunjang pembangunan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun penelitian yang dilakukan mengenai Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan yaitu (Jumiati & Adam, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Perekonomian Masyarakat, Perluasan Lapangan Kerja dan Peluang Usaha Masyarakat Desa” mengemukakan bahwa berdasarkan *test of between effects* atau pengaruh variable secara individu, bahwa variable program dana desa masing-masing berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peluang usaha. dan dinyatakan bahwa secara bersama-sama ada

pengaruh program dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peluang usaha. selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh (Abdullah, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa” menunjukkan bahwa Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa Mamampang sudah efektif. Hal ini dapat di buktikan dengan jumlah program-program pembangunan yang telah di realisasikan sesuai dengan rencana pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa ini juga sudah cukup baik, di mana masyarakat sudah ikut terlibat dalam penyusunan rencana bankan sampai pada tahap pembangunan program tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan pandangan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah di uraikan diatas, di mana peneliti memfokuskan penelitian ini pada variabel dana desa dan pembangunan ekonomi. Maka judul yang akan digunakan adalah: “Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Luwu Utara (Studi Kasus: Kecamatan Tanalili)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan latar belakang di atas serta untuk memperjelas objek penelitian, maka penulis membatasi dan merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi di Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka tujuan penelitian yang diajukan penulis untuk mengetahui Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi di kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, dalam hal ini ilmu linguistik atau kebahasaan. Berkenaan dengan hal ini yaitu sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca khususnya mengenai Dana desa dan Pembangunan Ekonomi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang nantinya dapat digunakan oleh pihak perusahaan dalam hal ini Kantor Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara. Berkenaan dengan hal tersebut Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai Pengaruhnya dana desa terhadap Pembangunan Ekonomi di Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara.

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas dan tidak menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah Dana Desa yang ada Di Kabupaten Luwu Utara khususnya di kecamatan Tana Lili. Ruang lingkup yang akan dibahas yaitu peneliti memfokuskan pada pengaruh dana desa dan pembangunan ekonomi desa di kecamatan tana lili kabupaten luwu utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Dana Desa

Aset Kota yang selanjutnya disingkat DD adalah cadangan yang diperoleh dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Negara (APBN) yang diharapkan untuk kota-kota yang dipindahkan melalui Peraturan Daerah/Rencana Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Daerah Kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pemajuan, peningkatan kawasan dan penguatan kawasan. (Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 ayat 2).

Mengenai eksplorasi yang diarahkan oleh pencipta, dapat dikatakan bahwa Aset Kota adalah bentuk pemenuhan hak kota untuk melakukan kemandiriannya sehingga berkembang dan berkreasi mengikuti perkembangan kota yang sebenarnya, mengingat keragaman, dukungan, sertifikasi. kemandirian, demokratisasi dan penguatan wilayah lokal sebagaimana ditentukan. dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2.1.2. Dasar Hukum Dana Desa

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.1.3. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup, dan pengentasan kemiskinan:

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - 1) pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - 2) pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - 3) pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
 - 1) pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;

- 2) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 3) pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - 4) pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - 5) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 6) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - 7) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - 8) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - 9) pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
- c. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- 1) pendirian dan pengembangan BUMDesa;
 - 2) pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 - 3) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 - 4) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - 5) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 - 6) pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - 7) pengembangan benih lokal;
 - 8) pengembangan ternak secara kolektif;
 - 9) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - 10) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - 11) pengelolaan padang gembala;

- 12) pengembangan Desa Wisata; dan
 - 13) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- d. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- 1) komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain zircon, kaolin, zeolite, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar dan intan.
 - 2) Komoditas tambang batuan, antara lain onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (chert), jasper, krisopras, garnet, dan potensi komoditas tambang batuan lainnya.
 - 3) rumput laut;
 - 4) hutan milik desa; dan
 - 5) pengelolaan sampah.

Sedangkan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- 1) peningkatan kualitas proses perencanaan desa;

- 2) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- 3) pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 4) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- 5) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- 6) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- 7) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

Bupati atau walikota harus memberikan persetujuannya sebelum menggunakan Dana Desa untuk membayar hal-hal yang tidak termasuk dalam daftar prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam evaluasi rancangan peraturan anggaran desa, bupati memberikan persetujuannya. Bupati memastikan alokasi Dana Desa untuk kegiatan prioritas dan/atau kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi sebelum menyetujui penggunaan dana di luar prioritas tersebut.

2.1.4. Tujuan Dana Desa

Tujuan Dana Desa antara lain :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan kewenangannya.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

2.1.5. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang disalurkan ke desa oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota dari dana yang diterima dari sistem keuangan pusat dan daerah (PP No. 72 Tahun 2005 ayat 11 Pasal I). Pasal 90 Ayat 3 dan 5 Perda Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan kota dapat dilimpahkan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyediakan dana untuk kewenangan desa yang ditunjuk pemerintah pusat. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, di sisi lain, menyediakan dana untuk kewenangan desa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada desa.

Terlihat dari peraturan sebelumnya bahwa setiap desa akan mendapatkan anggaran Dana Desa baik dari pusat maupun daerah yang merupakan sumber kekayaan dan keuangan desa.

Penugasan toko kota adalah cadangan yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah yang ditujukan dengan titik perputaran yang setara dari batas keuangan antar kota untuk mengatasi masalah kota dalam rangka pengendalian pemerintahan dan pelaksanaan perbaikan dan penyelenggaraan daerah. yang penyalurannya dimungkinkan dengan dana tunai dari desa. Kabupaten menerima sebagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk alokasi dana desa.

Tujuan alokasi dana desa adalah untuk memudahkan pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Bekerja pada batas organisasi remedial dalam mengatur, melaksanakan dan mengendalikan perbaikan secara partisipatif sesuai potensi yang ada. Meningkatkan swadaya masyarakat, peluang usaha masyarakat, dan distribusi pendapatan.

Berikut ketentuan yang menjadi acuan pemerintah kabupaten/kota dalam menghitung dana desa masing-masing desa:

- 1) Ketentuan Bab II Peraturan Menteri Keuangan mengenai sumber dana, permodalan, variabel, dan bobot yang digunakan dalam perhitungan.
- 2) Sesuai Perpres Tentang Rincian APBN/APBD, rincian dana desa setiap kabupaten atau kota merupakan sumber dana desa yang digunakan dalam perhitungan.

3) Dana setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Alokasi dasar yang dibagi rata di setiap desa adalah 90 persen dari dana desa untuk setiap kabupaten atau kota.

A. Standar Administrasi Moneter Kota

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Administrasi Moneter Kota, Bagian I Pasal 1 yang terdiri dari 23 pasal memuat pengaturan umum.

Berikut adalah prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang dilanjutkan pada Bab II:

1) Paragraf pertama dan kedua Pasal 2 Bab II berbunyi sebagai berikut:

Penataan anggaran keuangan desa secara tertib dan teratur berdasarkan asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi.

2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung dalam satu tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

a. Pengelolaan Keuangan Desa

Kedudukan tertinggi dalam pengelolaan desa dipegang oleh kepala desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Kepala Desa juga harus menjadi penanggung jawab semua arah kebijakan pengelolaan keuangan desa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 3 yang terdiri dari tiga bagian. Sebuah kutipan:

1) Kepala Desa bertanggung jawab atas keuangan desa dan bertindak sebagai wakil Pemerintah Desa dalam hal kepemilikan kekayaan tersendiri yang menjadi milik desa.

2) Kepala Desa yang berwenang mengelola keuangan desa sebagaimana dimaksud pada alinea pertama:

I) Berkedudukan untuk: mendirikan PTPKD, memilih petugas pemungutan pendapatan desa, menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa, menyetujui pengeluaran untuk kegiatan yang dituangkan dalam APB Desa, dan melakukan tindakan yang menimbulkan biaya APB Desa.

3) Lurah dalam melakukan administrasi keuangan kota dibantu oleh PTPKD. Pemerintah desa menyelenggarakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan desa berasal dari:

I) Pembayaran asli kota, terdiri dari hasil bisnis kota, hasil kelimpahan kota, hasil peningkatan dan dukungan diri, kolaborasi umum, dan pembayaran asli lokal asli lainnya.

ii) Bagi hasil penilaian provinsi/kota tidak kurang dari 10% untuk kota-kota dan sebagian dari tuntutan daerah/kota ditugaskan untuk kota-kota. Desa menerima sekurang-kurangnya 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang tercantum dalam butir iii), yang disalurkan secara profesional kepada setiap desa melalui alokasi dana desa.

iv) Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Bersama dan Rezim/Pemerintah Daerah dengan pengaturan pelaksanaan usaha pemerintah.

v) Sumbangan dan hibah dari pihak ketiga yang tidak diwajibkan.

- Pelaksanaan

Bab V mengatur bagian pelaksanaan dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 34:

1) Semua penerimaan dan konsumsi kota sehubungan dengan praktik otoritas kota dibantu melalui rekening penyimpanan kota.

2) Khusus untuk kota-kota yang belum memiliki administrasi perbankan di wilayahnya, pemerintah daerah/metropolitan akan menentukan langkah-langkahnya.

3) Semua pengeluaran dan penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.

Berbagai pasal mulai dari Pasal 24 yang telah disebutkan tadi sampai dengan Pasal 34 tercantum dalam bagian kedua yang mengatur tentang pelaksanaan ini.

- Penatausahaan Penatausahaan keuangan desa diatur dalam Pasal 35 dan 36 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 35 Bendahara Desa membidangi administrasi.

2) Setiap akhir bulan, Bendahara Desa wajib menutup dengan rapi pembukuan dan mencatat setiap pembayaran dan penerimaan.

3) Town Financier wajib merepresentasikan kas melalui laporan pertanggungjawaban.

4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Lurah selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan berikutnya.

- Mengungkapkan

Untuk pasal 37 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Penatausahaan Keuangan Kota, mengatur tentang pengelolaan dana desa. artikel ke-37:

1) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota mengenai pelaksanaan APB Desa sebagai berikut:

a) Laporan semester pertama; Apalagi,

b) laporan semester akhir tahun.

2) Laporan realisasi APB Desa merupakan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Laporan pengakuan pelaksanaan APB Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.

4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

• Tanggung jawab

Pasal 38

1) Lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APB Kota kepada Pejabat/Kepala Kota menjelang akhir tahun anggaran.

(2) Bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan.

(3) Perdes mengamanatkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4) Terlampir Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3):

- a) Laporan Susunan Tanggung Jawab Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan.
- c) Cara Desa menerima laporan program pemerintah dan pemerintah daerah.

2.1.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, APB Desa terdiri dari tiga komponen yaitu Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

- A. Pendapatan Desa Desa tidak perlu mengembalikan uang yang diterimanya melalui rekening desa selama satu tahun anggaran melalui transfer atau pendapatan desa lainnya. Pendapatan asli desa, dana transfer dan pendapatan lain untuk pendapatan pajak kabupaten/kota, bagian retribusi kabupaten/kota, bantuan keuangan dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, dan kontribusi pihak ketiga adalah tiga jenis pendapatan desa.
- B. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa selama satu tahun anggaran dan tidak akan dibayar kembali. Dalam membahas bagaimana membiayai pelaksanaan kewenangan desa, digunakan istilah “belanja desa”. Ada empat kelompok dalam Klasifikasi Pengeluaran Desa:
 - 1) Pelaksanaan pembangunan desa
 - 2) Pengembangan masyarakat
 - 3) Pemberdayaan masyarakat desa
 - 4) Belanja tak terduga)
 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) membagi kelompok belanja di atas menjadi kegiatan berdasarkan kebutuhan desa. Masing-masing latihan ini kemudian dipisahkan menurut jenis konsumsinya:

1) Pengeluaran oleh karyawan; 2) Pembelian barang dan jasa; 3) Investasi modal;

c) Penerimaan Pembiayaan Desa yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diganti baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Kelompok-kelompok berikut membentuk dana desa:

1) Penerimaan tunjangan, penangguhan perhitungan rencana keuangan (Silpa tahun sebelumnya), pengeluaran cadangan simpanan, berlanjut dari penawaran sumber daya kota terpencil.

2) Biaya yang terkait dengan pembiayaan, pembuatan dana cadangan, dan penyertaan modal desa

2.1.7. Penyusunan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Tentang Dana Desa

Proses penyusunan kebijakan dana desa yang dimulai oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melibatkan banyak pihak yang menginginkan desa mandiri, seperti unsur pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, kelompok masyarakat di desa, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi.

Pemerintah kabupaten/kota membentuk tim yang terdiri dari aparat pemerintah daerah, perwakilan kecamatan dan desa dari DPRD dan BPD, serta organisasi masyarakat yang berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan desa untuk menyusun kebijakan daerah tentang dana desa. Sesuai dengan kebijakan daerah, tim tersebut di atas bertugas menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan dana desa. Peraturan bupati/walikota atau peraturan daerah menetapkan kebijakan daerah tentang dana desa. Transparansi dan partisipasi masyarakat

menjadi inti dari proses pembuatan peraturan dana desa, baik itu peraturan bupati/walikota maupun peraturan daerah.

2.1.8. Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan dan ekonomi adalah dua kata yang membentuk istilah "pembangunan ekonomi". Sesuai dengan Rumusan Kata Bahasa Indonesia Keseluruhan, perbaikan adalah hasil dari pekerjaan bangunan, sedangkan keuangan adalah ilmu yang berhubungan dengan penanganan produk modern, hortikultura dan pertukaran (Badudu, 2001).

Menurut Sukirno (1996) dan Saerofi (2005), proses naiknya pendapatan riil per kapita masyarakat dari waktu ke waktu merupakan definisi pembangunan ekonomi yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini. Melihat definisi ini cenderung terlihat bahwa kemajuan moneter menyiratkan adanya siklus perbaikan yang terjadi tanpa henti yaitu menambah dan mengembangkan semua itu menjadi jauh lebih unggul. Dengan adanya siklus peningkatan tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan pendapatan asli daerah dalam jangka panjang.

Menurut Choirullah (2007), kerangka pencapaian pembangunan nasional mensyaratkan bahwa pembangunan sektor ekonomi yang terjadi di setiap wilayah wilayah Indonesia disesuaikan dengan potensi dan prioritas masing-masing daerah.

Proses pembangunan ekonomi merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan. Apa pun yang sedang diselesaikan, substansi interaksi dan sifat peningkatan mencerminkan lompatan maju lainnya, jadi ini bukan sekadar

gambaran moneter satu kali. Pendapatan riil per kapita juga terkait dengan pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, pendapatan total atau disebut juga pendapatan nasional, dan jumlah penduduk merupakan dua aspek penting yang saling berhubungan. Gaji per kapita menyiratkan gaji penuh yang dipisahkan oleh jumlah penghuni.

Menurut Yuladi (2009), isu-isu utama yang mempengaruhi pembangunan Indonesia selama penyusunan RPJMN periode 2004 hingga 2009 adalah sebagai berikut:

- A. Sejumlah besar orang miskin dan pengangguran.
- B. Rendahnya kualitas SDM (SDM).
- C. Disparitas Indonesia dalam pembangunan antar golongan, daerah, dan daerah.
- D. Kualitas lingkungan dan sumber daya alam (SDA) yang menurun.
- e. Kurangnya keadilan dan penegakan hukum.
- F. Potensi konflik horizontal dan tingginya angka kriminalitas tetap ada.
- G. Kemungkinan separatisme dan terbatasnya kemampuan pertahanan dan keamanan
- H. Lembaga-lembaga demokrasi tetap tidak memadai.

Untuk memperhatikan dan menyelidiki masalah peningkatan dan bagaimana strategi dianut, percakapan dilakukan oleh pertemuan dan area kemajuan.

Untuk mencapai tiga tujuan pembangunan nasional (triple bottom line) secara bersamaan—pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dan terpeliharanya keberlanjutan—Indonesia, negara dengan sumber daya manusia yang terbatas tetapi sumber daya alam yang

melimpah, perlu mengembangkan strategi kebijakan. iklim dan aset reguler. Untuk memahami tujuan peningkatan publik ini, penting untuk mengetahui strategi kemajuan yang digabungkan (Yuliadi, 2009):

- A. Memproduksi barang yang berdaya saing dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi secara berkelanjutan.
- B. Secara konsisten melaksanakan tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan mengembangkan industri pertanian dan perkebunan.
- C. Program nasional untuk mendiversifikasi pasokan pangan dengan menciptakan pangan yang tidak mengandung beras untuk memberikan lebih banyak pilihan pangan kepada masyarakat dan membantu mereka menjadi swasembada pangan.
- D. Pertumbuhan sektor manufaktur dengan nilai tambah yang tinggi, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan dorongan usaha ekonomi terkait.
- e. Peningkatan bisnis pendukung untuk memperkuat area kekuatan yang serius untuk desain modern publik yang mantap untuk peningkatan area moneter terkait.
- F. Menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan bisnis dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- G. Adanya bantuan politik (political will) dari seluruh komponen penting otoritas publik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan pelaksanaan moneter.

meningkatkan etos kerja karyawan serta mencegah dan memberantas praktik-praktik yang dapat merusak sistem ekonomi, antara lain KKN dan penembangan liar, untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multifaset yang mencakup kebijakan ekonomi dan nonekonomi secara keseluruhan. Menurut Suryana (2000) dan Todaro (1983), berikut adalah tujuan pembangunan minimal dan spesifik:

- A. Peningkatan pasokan dan pertumbuhan apropriasi atau nilai produk penting harus sudah siap untuk hidup seperti penginapan, kesejahteraan dan iklim.
- B. Meningkatkan harapan hidup mencakup perluasan gaji dan pemberian bisnis tanpa henti, pelatihan yang lebih baik, dan penghargaan yang lebih tinggi terhadap kualitas sosial yang welas asih, yang secara eksklusif tidak semata-mata untuk mengatasi masalah materi, namun untuk membangun keakraban dengan kepercayaan diri yang tinggi. nasional dan individu
 - a. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, tetapi dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Ada empat model pembangunan yaitu model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (Suryana, 2000). Berdasar atas model pembangunan tersebut, semua itu bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan barang-barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja baru dengan upah yang layak, dengan harapan

tercapainya tingkat hidup minimal untuk semua rumah tangga yang kemudian sampai batas maksimal.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tinjauan literatur adalah pemeriksaan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian peneliti. Untuk mengetahui apakah penelitian telah dilakukan atau belum, maka dilakukan kajian literatur. selain menyadari perbedaan antara penelitian yang direncanakan dan penelitian sebelumnya. Variabel dalam penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Dana Desa terhadap Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan” terdapat pada beberapa penelitian lainnya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Marselina Ara Lili (2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan karya Kecamatan Lumar	• Hasil penelitian menyatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar
2.	Abdul Holik (2019)	Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Mabat, Desa Mangka, dan Desa Bakam	• Hasil dari penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa dalam proses penerapannya, dana desa memberikan pengaruh signifikan dalam menunjang proses pembangunan desa.
3.	(Sintia, 2019)	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)	• Bahwa tingkat efektivitas Dana Desa di Desa Semuli Raya adalah sebesar 86,93% termasuk dalam kategori cukup efektif. Faktor-faktor penghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan

No.	Nama, Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			fisik di Desa Semuli Raya yaitu sumber daya manusia dan informasi. Berdasarkan ekonomi Islam maka sudah dapat dikatakan baik, menurut Islam berdasarkan asas keadilan dalam sebagaimana tugas manusia sebagai khilafah di muka bumi pelaksanaan dana desa sudah cukup dirasakan masyarakat.
4.	(Jumiati & Adam, 2020)	Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Perekonomian Masyarakat, Perluasan Lapangan Kerja dan Peluang Usaha Masyarakat Desa (Studi Deskriptif Korelasi pada 10 Desa di Kabupaten Purwakarta)	- Bahwa variable program dana desa masing-masing berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peluang usaha. Karena seluruh variable nilai signifikansinya $>$ dari 0.05; - Bahwa secara bersama-sama ada pengaruh program dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peluang usaha, karena nilai F hitung $>$ dari F table.
5.	(Khatimah, 2020)	Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)	Menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan yang dilakukan oleh aparatur desa sudah sangat bagus dan membantu masyarakat Gampong Lambeugak untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan. Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat belum maksimal karena program yang dilakukan di Gampong Lambeugak terfokuskan untuk lelaki saja sedangkan untuk perempuan

No.	Nama, Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			tidak ada program khusus untuk pemberdayaan perempuan.
6.	(Simbolon, 2019)	Manfaat Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Simalungun (Studi Kasus : Kecamatan Raya)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Desa memberikan manfaat dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Hal ini dilihat dari pembangunan infrastruktur jalan desa dan peningkatan pendapatan masyarakat desa.
7.	Egah Nadia (2021)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Baku-baku Kecamatan Malang ke Barat	• Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur.
8.	(Tobing et al., 2021)	Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Kecamatan Siantar Narumonda melalui Pemberdayaan Masyarakat	• Menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh Positif signifikan terhadap pembangunan desa, • Sedangkan terhadap pemberdayaan masyarakat, dana desa berpengaruh positif signifikan dan • Pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan desa.
9.	(Nadia, 2021)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat	Menunjukkan bahwa variabel Alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur. Dengan hasil perhitungan uji t hitung sebesar 3,946, sedangkan pada t tabel adalah 1,98472 pada taraf signifikansi 5% yang berarti bahwa H_0 di terima dan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Selain itu juga di peroleh persamaan regresi $Y = 17.528 + 0,342X$. Jadi dapat di simpulkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh secara

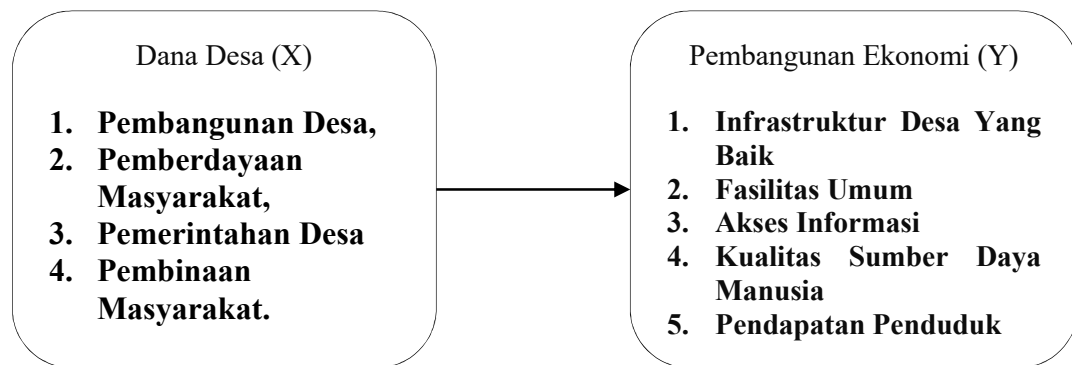
No.	Nama, Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			signifikan terhadap pembangunan infrastruktur.
10.	(Arina et al., 2021)	Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara	• Secara Simultan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara, • Secara parsial Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara dan • Secara parsial Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara
11.	(Dewi, 2021)	Analisis Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Wilayah Di Kabupaten Klaten	Berdasarkan hasil estimasi Regresi Data Panel dan uji hipotesis, ditemukan bahwa bahwa Dana Desa berpengaruh positif terhadap Indeks Desa Membangun (IDM).

2.3. Kerangka Konseptual

Menurut Sugyono (2015), kerangka konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai isu penting. Penelitian ini didasarkan pada variabel-variabel yang akan diteliti karena dana desa merupakan faktor terpenting dalam pembangunan ekonomi suatu desa.

Aset Kota diberikan kepada setiap kota dalam 4 (empat) jenis belanja, yaitu belanja untuk Pembangunan Kota, Penguatan Kelompok Masyarakat, Penataan Kota dan Perbaikan Daerah. Pembangunan Desa. Tujuan dari pengeluaran ini adalah untuk mendorong inovasi desa dan pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya,

pengaruh keuangan kota akan benar-benar ingin mengembangkan status kota lebih lanjut, mengembangkan kantor dan yayasan kota lebih lanjut, dan bekerja pada ekonomi jaringan kota. Berikut adalah gambaran kerangka konseptual penelitian ini:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Sumber : Data Diolah

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka konsep yang telah diuraikan sebelumnya dalam penelitian ini diduga Dana desa pengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan ekonomi di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penulis penelitian ini mengambil pendekatan kuantitatif. “Pendekatan kuantitatif adalah pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah yang berasal dari sampel orang atau penduduk yang diminta untuk menjawab sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka,” menurut Cresweel (2010).

Menurut Cresweel (2010), penelitian dalam pendekatan kuantitatif ini akan ditentukan terlebih dahulu, dengan data statistik dianalisis dan diinterpretasikan. Pendekatan kuantitatif digunakan oleh peneliti untuk menguji teori dengan menjelaskan hipotesis tertentu dan kemudian mengumpulkan data untuk membuktikan atau menyangkal hipotesis tersebut. Cara penanganan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pemeriksaan kuantitatif dilihat dari data yang terukur. Untuk sampai pada generalisasi yang dapat diterapkan pada waktu, tempat, atau keadaan apa pun, pendekatan penelitian untuk memecahkan masalah memerlukan pengukuran variabel objek yang tepat.

Selain itu, Sugiyono (2012) mengatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah metode kuantitatif yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berbasis positivis. Metode ini digunakan untuk memeriksa populasi atau sampel tertentu; instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data; dan analisis data kuantitatif atau statistik digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kuantitatif merupakan suatu pendekatan di dalam penelitian untuk menguji hipotesis dengan menggunakan uji data statistik yang akurat. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh dana desa terhadap Pembangunan Ekonomi, di kecamatan Tana lili Kabupaten Luwu Utara.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tana Lili dengan waktu penelitian yang dibutuhkan selama dua bulan yaitu bulan Mei s/d Juni 2022.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

(Sugiyono, 2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian adalah masyarakat Kecamatan Tana Lili dengan jumlah penduduk mencapai 22,245 jiwa yang tersebar di 10 Desa. Dengan keterbatasan dari segi waktu, tenaga dan materi, maka dilakukan penarikan sampel. Ferdinand (dalam Tobing *et al.*, 2021) menyatakan bila ukuran sampel terlalu besar maka model menjadi sangat sensitif sehingga sulit untuk mendapatkan hasil yang baik. Untuk itu disarankan ukuran sampel adalah 5- 10 kali jumlah variabel manifest dari seluruh variabel laten, selanjutnya ditentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, $n = 10 \times (\text{jumlah variabel laten} + \text{jumlah variabel indikator}) = 10 \times (3 \text{ variabel laten} + 18 \text{ variabel indikator}) = 210$. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan pendekatan proporsional random sampling. Penggunaan metode ini

dilakukan agar setiap populasi memiliki keterwakilan dan kesempatan yang sama menjadi sampel penelitian.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data kuantitatif dalam melakukan analisis ini.

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang di dapatkan dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini maka data kuantitatif dapat di proses menggunakan rumus matematika atau dapat juga di analisis dengan sistem statistik.

b. Data Kualitatif

Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat di lakukan melalui wawancara.

3.4.2. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2013) jika dilihat datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.2.1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2013) Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan langsung ke Kantor Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara dengan menyebarkan kuisioner kepada pegawai, dan masyarakat yang ada di kecamatan tana lili.

3.4.2.2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013) Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen dan melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data sekunder penelitian yang akan diperoleh berasal dari buku, jurnal-jurnal, skripsi, laporan APBD dan dari internet.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

3.5.1. Pengamatan (observasi)

Pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti.

3.5.2. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber data dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah,

artikel, dan juga situs web yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Sugiyono (2013) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data untuk membantu dalam penulisan proposal dan juga pembuatan media.

3.5.3. Kuesioner (angket)

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai penulis adalah Kuesioner (angket). Menurut Sugiyono (2013) Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

3.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Pengujian ini untuk menganalisis secara empiris mengenai pengaruh dana desa terhadap pembangunan ekonomi pedesaan dan pembangunan infrastruktur pedesaan.

a. Variabel Bebas (*Independen*)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas/*Independen* dalam penelitian ini adalah Dana Desa (X).

Dana Desa (X) yaitu Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Variabel Terikat (*Dependen*)

Variabel terikat sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat/*Dependen* dalam penelitian ini adalah Pembangunan Ekonomi (Y).

Pembangunan ekonomi yaitu Menurut Sadono Sukirno (2011), pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

3.6.2. Definisi Operasional

Tabel 3.2
Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skal
Dana Desa (X)	Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat	1. Pembangunan Desa 2. Pemberdayaan Desa 3. Pemerintah Desa 4. Pembinaan Masyarakat	<i>Likert</i>
Pembangunan Ekonomi Pedesaan (Y)	Pembangunan ekonomi desa sendiri di pahami sebagai suatu proses untuk memperbaiki kondisi hidup dari seluruh wilayah atau Negara tertentu agar timbul pemerataan pembangunan di suatu wilayah tersebut.	1. Infrastruktur Desa Yang Baik 2. Fasilitas Umum Yang Memadahi 3. Akses Informasi 4. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul 5. Pendapatan Penduduk	<i>Likert</i>

3.7. Instrumen Penelitian

Instrumen eksplorasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey atau jajak pendapat yang dilakukan oleh ahlinya sendiri. “Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam dan sosial yang diamati,” ungkap Sugiyono (2014). Oleh karena itu, penggunaan instrumen ujian adalah untuk melacak data total tentang suatu masalah, karakteristik atau kekhasan sosial.

Menggunakan skala Likert, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk menghasilkan data yang presisi. “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial,” menurut Sugiyono (2014). Kuesioner berikut digunakan oleh para peneliti dalam penelitian ini:

Tabel 3.3
skala *Likert*

No.	Keterangan	Kode	Skor
1.	Sangat Setuju	SS	5
2.	Setuju	S	4
3.	Kurang Setuju	KS	3
4.	Tidak Setuju	TS	2
5.	Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber : Sugiyono (2014)

3.7.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian instrumen dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian ini dilakukan agar tujuan penelitian ini dilakukan dapat dicapai.

a. Uji Validitas

Menurut Sekaran dan Bougie (2013) uji validitas merupakan rangkaian tes mengenai seberapa baik instrumen yang dikembangkan dalam mengukur kuesioner. Skala pengukuran dinyatakan valid jika pertanyaan kuesioner yang diajukan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Semakin tinggi tingkat validitas suatu alat ukur, maka semakin tepat pula alat ukur tersebut mengenai sasaran. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS. Ghazali (2011) berpendapat pengujian validitas

pada kuesioner dapat menggunakan teknik korelasi, Pengambilan keputusan didasarkan jika $\alpha < 0,05$ maka, kuesioner dianggap valid dan sebaliknya jika $\alpha > 0,05$ maka, kuesioner dianggap tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk menguji bagaimana konsistensi dari instrumen penelitian yang mengukur konsep tertentu yang akan diukur (Sekaran dan Bougie, 2013). Konsistensi dan stabilitas dari skala pengukuran ditunjukkan oleh adanya Uji reabilitas. Selain itu uji reabilitas lebih memusatkan perhatian pada masalah konsistensi sedangkan uji validitas lebih memperhatikan dalam masalah ketepatan. Penelitian ini menggunakan alat ukur Cronbach's Alpha. Statistik ini digunakan karena untuk mengetahui reliabel kah pengukuran yang dibuat. Jika nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,6$ ini menunjukkan bahwa item pertanyaan dianggap reliabel begitupun sebaliknya apabila Cronbach's Alpha $\leq 0,6$ maka item pertanyaan dianggap tidak reliabel.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program pengelolaan data statistik *SPSS*, 25 merupakan program aplikasi yang disajikan untuk analisis statistik dan ekonometrika dan digunakan untuk analisis

3.8. Analisis Data

3.8.1. Uji Regresi Linier Sederhana

Tahap selanjutnya adalah melakukan uji regresi linear sederhana dengan menggunakan (*software*) statistic SPSS (*statistical package for social sciense*) versi 20. Metode ini digunakan untuk menguji satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linear sederhana karena hanya memiliki satu variabel dependen dan satu variabel independen. Model untuk teknik regresi sederhana di uraikan sebagai berikut: (Haerullah, 2020).

$$Y = a + \beta_1 X_1 + ei$$

Keterangan:

Y = Pembangunan Ekonomi

X = Dana Desa

α = Konstanta

β = Beta

ei = nilai eror

3.8.2. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari

variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2=0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2=1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila $R^2=1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

BAB IV

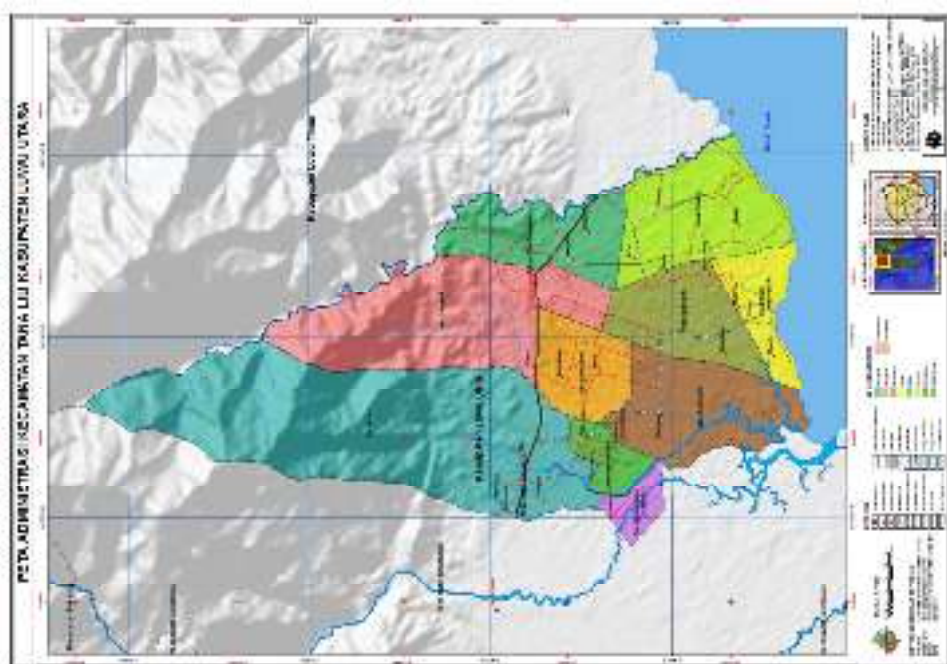
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Wilayah Administrasi

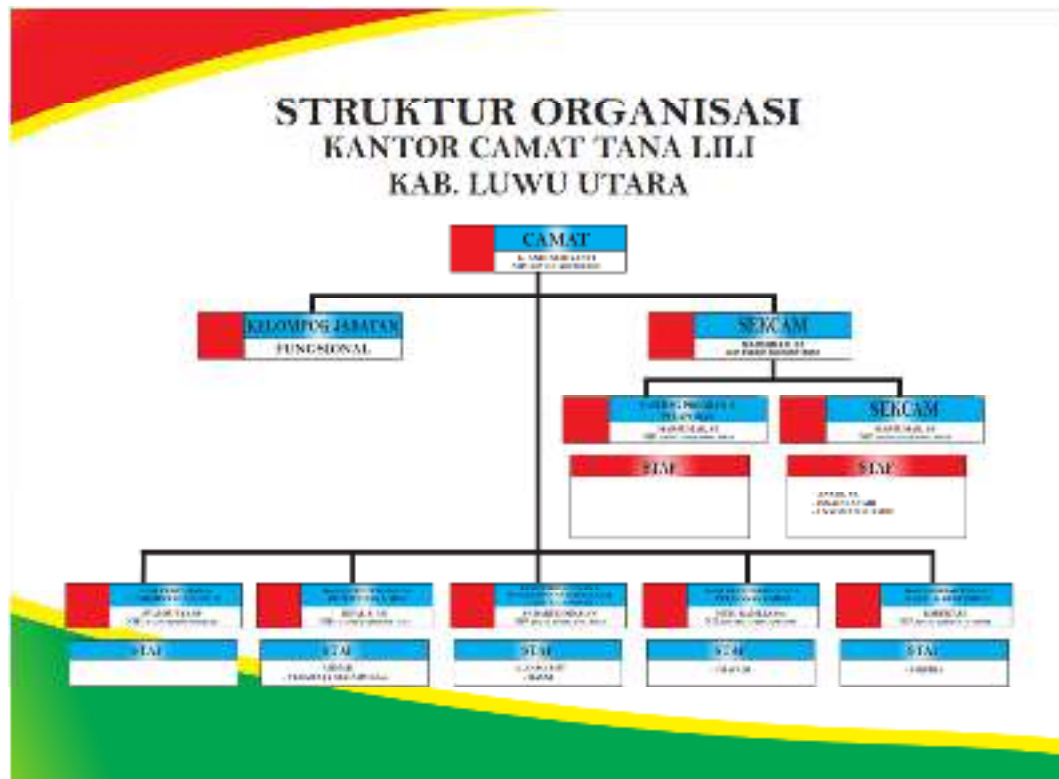
Tana Lili memiliki wilayah administratif yang cukup luas dengan luas wilayah sekitar + 149 km². Posisi Kecamatan Tana Lili berada ditengah wilayah Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Bone-Bone di bagian barat, Kabupaten Luwu Timur di bagian timur dan selatan berbatasan dengan Kecamatan Selat Bone.

Kecamatan Tana Lili terdiri dari 10 (sepuluh) Desa yaitu Patila, Bungapati, Bungadidi, Sumberdadi, Poreang, Munte, Karondang, Rampoang, Sidobinangun, dan Sidomakmur. Penduduk Kecamatan Tana Lili berjumlah 22.347 jiwa yaitu 11.348 laki-laki dan 11.149 Jiwa perempuan.



Gambar 4.2 Wilayah Administrasi Kecamatan Tana Lili

Struktur Oranisasi Pemerintahan Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara



Gambar 4.3 Struktur Oranisasi

4.1.2 Analisis Karakteristik Responden

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tingkat jenis kelamin responden yang ada pada Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	94	44,8	44,8	44,8
	Perempuan	116	55,2	55,2	100,0
	Total	210	100,0	100,0	

Sumber: Output SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa data responden berdasarkan jenis kelamin pada Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara sebanyak 94 orang laki-laki dan 116 orang perempuan dari jumlah total responden 210 orang. Dari sampel yang penulis peroleh menunjukkan 44,8% berjenis kelamin laki-laki, 55,2% responden berjenis kelamin perempuan, yang berarti penulis memperoleh responden yang didominasi oleh responden berjenis kelamin Perempuan.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Adapun data responden berdasarkan usia pada Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut:

Tabel 4.5
Data Responden Berdasarkan Usia

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18-25	52	24,8	24,8	24,8
	26-30	37	17,6	17,6	42,4
	31-40	61	29,0	29,0	71,4
	>40	60	28,6	28,6	100,0
	Total	210	100,0	100,0	

Sumber: Output SPSS 25, 2022

Berdasarkan table 4.5 menunjukkan 24,8% responden yang diambil penulis pada Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara adalah berusia 18-25 tahun, 17,6% berusia 26-30 tahun, 29% berusia 31-40 tahun dan 28,6% berusia >40 tahun, yang berarti penulis dominan mengambil sampel responden pada Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara berusia 31-40 tahun.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Adapun data responden berdasarkan Pendidikan Terakhir pada Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut:

Tabel 4.6
Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA/SMK	176	83,8	83,8	83,8
	D3	1	,5	,5	84,3
	S1	33	15,7	15,7	100,0
	Total	210	100,0	100,0	

Sumber: Output SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa Pendidikan terakhir responden di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara memiliki Pendidikan terakhir SMA/SMK 176 responden (83,8%) D3 1 responden (0,5%) dan S1 33 responden (15,7%) Yang berarti penulis mengambil sampel dominan memiliki Pendidikan SMA/SMK.

4.1.3 Distribusi Jawaban Responden

a. Tabel 4.7 Distribusi jawaban Responden untuk Variabel Dana Desa

(X)

X	STS		TS		KS		S		SS		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
x.1	0	0	0	0	6	2,9	124	59,0	80	38,1	210	100%
x.2	0	0	0	0	10	4,8	107	51,0	93	44,3	210	100%
x.3	0	0	0	0	4	1,9	113	53,8	93	44,3	210	100%
x.4	0	0	0	0	8	3,8	106	50,5	96	45,7	210	100%
x.5	0	0	0	0	7	3,3	51	24,3	152	72,4	210	100%

X	STS		TS		KS		S		SS		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
x.6	0	0	0	0	7	3,3	90	42,9	113	53,8	210	100%
x.7	0	0	0	0	7	3,3	81	38,6	122	58,1	210	100%
x.8	0	0	0	0	7	3,3	101	48,1	102	48,6	210	100%

Sumber: Output SPSS 25, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Indikator (x.1) responden dominan memilih “Setuju (S)” yaitu sebanyak 124 orang atau sebesar 59,0% dan paling sedikit responden memilih “Setuju (S)” yaitu sebanyak 6 orang atau sebesar 2,9%. Indikator (x.2) responden dominan memilih “Setuju (S)” yaitu sebanyak 107 orang atau sebesar 51,0% dan paling sedikit responden memilih “Kurang Setuju (KS)” yaitu sebanyak 10 orang atau sebesar 4,8%. Indikator (x.3) responden dominan memilih “Setuju (S)” yaitu sebanyak 113 orang atau sebesar 53,8% dan paling sedikit responden memilih “Kurang Setuju (KS)” yaitu sebanyak 4 orang atau sebesar 1,9%. Indikator (x.4) responden dominan memilih “Setuju (S)” yaitu sebanyak 106 orang atau sebesar 50,5% dan paling sedikit responden memilih “Kurang Setuju (KS)” yaitu sebanyak 8 orang atau sebesar 3,8%. Indikator (x.5) responden dominan memilih “Sangat Setuju (SS)” yaitu sebanyak 152 orang atau sebesar 72,4% dan paling sedikit responden memilih “Kurang Setuju (KS)” yaitu sebanyak 7 orang atau sebesar 3,3%. Indikator (x.6) responden dominan memilih “Sangat Setuju (SS)” yaitu sebanyak 113 orang atau sebesar 53,8% dan paling sedikit responden memilih “Kurang Setuju (KS)” yaitu sebanyak 7 orang atau sebesar 3,3%. Indikator (x.7) responden dominan memilih “Sangat Setuju (SS)” yaitu sebanyak 122 orang atau sebesar 58,1% dan paling sedikit responden memilih “Kurang Setuju (KS)” yaitu sebanyak 7 orang atau sebesar 3,3%.

Indikator (x.8) responden dominan memilih “Sangat Setuju (S)” yaitu sebanyak 102 orang atau sebesar 48,6% dan paling sedikit responden memilih “Kurang Setuju (KS)” yaitu sebanyak 7 orang atau sebesar 3,3%.

b. Tabel 4.8 Distribusi jawaban Responden untuk Variabel Pembangunan Ekonomi (Y)

Y	STS		TS		KS		S		SS		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
y1	0	0	0	0	3	1,4	128	61	79	37,6	210	100%
y2	0	0	0	0	3	1,4	56	26,7	151	71,9	210	100%
y3	0	0	0	0	3	1,4	102	48,6	105	50,0	210	100%
y4	0	0	0	0	3	1,4	91	43,3	116	55,2	210	100%
y5	0	0	0	0	7	3,3	55	26,2	148	70,5	210	100%
y6	0	0	0	0	5	2,4	99	47,1	106	50,5	210	100%
y7	0	0	0	0	2	1,0	89	42,4	119	56,7	210	100%
y8	0	0	0	0	8	3,8	81	38,6	121	57,6	210	100%
y9	0	0	0	0	11	5,2	94	44,8	105	50,0	210	100%
y10	0	0	0	0	5	2,4	69	32,9	136	64,8	210	100%

Sumber: Output SPSS 25, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Indikator (y1) responden dominan memilih “Setuju (S)” yaitu sebanyak 128 orang atau sebesar 61,0% dan paling sedikit responden memilih “Kurang Setuju (KS) yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 1,4% . Indikator (y2) responden dominan memilih “Sangat Setuju (SS)” yaitu sebanyak 151 orang atau sebesar 71,9% dan paling sedikit responden memilih “Kurang Setuju (S)” yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 1,4%. Indikator (y3) responden dominan memilih “Sangat Setuju (SS)” yaitu sebanyak 105 orang atau sebesar 50,0% dan paling sedikit responden memilih “Kurang Setuju (KS)” yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 1,4%. Indikator (y4) responden dominan

memilih “Sangat Setuju (SS)” yaitu sebanyak 116 orang atau sebesar 55,2% dan paling sedikit responden memilih “Kurang Setuju (KS)” yaitu sebanyak 3 orang atau 1,4%. Indikator (y5) responden dominan memilih “Sangat Setuju (SS)” yaitu sebanyak 148 orang atau sebesar 70,5% dan paling sedikit responden memilih “Kurang Setuju (KS)” yaitu sebanyak 7 orang atau sebesar 3,3%. Indikator (y6) responden dominan memilih “Sangat Setuju (SS)” yaitu sebanyak 106 orang atau sebesar 50,5% dan paling sedikit responden memilih “Kurang Setuju (KS)” yaitu sebanyak 5 orang atau sebesar 2,4%. Indikator (y7) responden dominan memilih “Sangat Setuju (SS)” yaitu sebanyak 119 orang atau sebesar 56,7% dan paling sedikit responden memilih “Kurang Setuju (KS)” yaitu sebanyak 2 orang atau sebesar 1,0%. Indikator (y8) responden dominan memilih “Sangat Setuju (SS)” yaitu sebanyak 121 orang atau sebesar 57,6% dan paling sedikit responden memilih “Kurang Setuju (KS)” yaitu sebanyak 8 orang atau sebesar 3,8%. Indikator (y9) responden dominan memilih “Sangat Setuju (SS)” yaitu sebanyak 105 orang atau sebesar 50,0% dan paling sedikit responden memilih “Kurang Setuju (KS)” yaitu sebanyak 11 orang atau sebesar 5,2%. Dan terakhir Indikator (y10) responden dominan memilih “Sangat Setuju (SS)” yaitu sebanyak 136 orang atau sebesar 64,8% dan paling sedikit responden memilih “Kurang Setuju (KS)” yaitu sebanyak 5 orang atau sebesar 2,4%.

4.1.4 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a. Uji Validitas

Pengujian validitas menunjukkan ketelitian serta ketepatan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui validitas pertanyaan dari setiap variabel, maka r_{hitung} dibandingkan dengan r_{tabel} . r_{tabel} dapat dihitung dengan $df = N - 2$. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 210, sehingga $df = 210 - 2 = 208$, $r_{(208)} = 1.652$. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Tabel 4.9. Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Keterangan
Dana Desa (X)	x ₁	0,449 > 0,135	Valid
	x ₂	0,614 > 0,135	Valid
	x ₃	0,556 > 0,135	Valid
	x ₄	0,642 > 0,135	Valid
	x ₅	0,543 > 0,135	Valid
	x ₆	0,499 > 0,135	Valid
	x ₇	0,605 > 0,135	Valid
	x ₈	0,493 > 0,135	Valid
Pembangunan Ekonomi (Y)	y ₁	0,427 > 0,135	Valid
	y ₂	0,392 > 0,135	Valid
	y ₃	0,566 > 0,135	Valid
	y ₄	0,506 > 0,135	Valid
	y ₅	0,541 > 0,135	Valid
	y ₆	0,610 > 0,135	Valid
	y ₇	0,403 > 0,135	Valid
	y ₈	0,614 > 0,135	Valid
	y ₉	0,513 > 0,135	Valid
	y ₁₀	0,516 > 0,135	Valid

Sumber: Output SPSS 25, 2022

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dalam kuesioner dapat dikatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Hal ini dibuktikan dengan nilai *Corrected Item – Total* > 0,135.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menunjukkan seberapa besar suatu instrument tersebut dapat dipercaya dan digunakan sebagai alat pengumpul data. Reliabilitas instrumen yang semakin tinggi, menunjukkan hasil ukur yang didapatkan semakin terpercaya (reliabel). Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai *cronbach's alpha* > r tabel (0,6) maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten
2. Sementara, Jika nilai *cronbach's alpha* < r tabel (0,6) maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliabel.

Berikut adalah hasil uji reliabilitas atas variabel-variabel:

Tabel 4.10. Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha(> 0.6)	Keterangan
Dana Desa (X)	0,672	<i>Reliabel</i>
Pembangunan Ekonomi (Y)	0,685	<i>Reliabel</i>

Sumber: Output SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, menunjukkan bahwa semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian adalah reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. Sehingga berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas, menunjukkan bahwa instrument memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan nilai *koefisien alpha* > 0,6, jadi hasil ukur yang akan didapatkan dapat dipercaya.

4.1.5 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisi regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk permodelan hubungan antara variabel independen dan dependen. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mencari pengaruh antara variabel independen (X) dan dependen (Y). Analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS versi 25 *for windows*. Adapun data hasil analisis perhitungan regresi sederhana sebagai berikut:

Tabel 4.11. Uji Regresi Linier Sederhana

Model		Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1	(Constant)	33,692	2,666		12,639	,000
	Dana Desa	,327	,074	,292	4,406	,000

a. Dependent Variable: Pembangunan Ekonomi

Sumber: Output SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.11 menjelaskan nilai konstanta (a) adalah 33,692. sedangkan nilai koefisien pengelolaan dana desa (X) adalah 0,327, sehingga persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 33,692 + 0,327 (x) + e$$

- Nilai konstanta pada persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik di atas adalah sebesar 33,692. hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen (Dana Desa) adalah konstanta (nilai $X = 0$), maka pembangunan Ekonomi (Y) sebesar 33,692 satuan.
- Berdasarkan hasil uji regresi yang diperoleh koefisien regresi dana desa sebesar 0.327 menyatakan bahwa setiap penambahan Satu Rupiah, maka nilai

Pembangunan Ekonomi meningkat sebesar 0.327. Koefisien regresi sederhana bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa dana desa terhadap pembangunan ekonomi bernilai positif.

4.1.6 Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Menurut Ghozali (2016) nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya jika nilai mendekati 1 (satu) dan menjauhi 0 (nol) memiliki arti bahwa variabel-variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016). Berikut tabel uji koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut:

Tabel 4.12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	Model Summary ^b		Std. Error of the Estimate
		R Square	Adjusted R Square	
1	,292 ^a	,085	,081	2,62481

a. Predictors: (Constant), Dana Desa

b. Dependent Variable: Pembangunan Ekonomi

Sumber: Output SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi tabel 4.12 maka diperoleh nilai R-Square sebesar 0.085 (8.5%). Hal tersebut memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 8.5%, sedangkan sisanya sebesar 91.5% ($1 - 0.085$) di jelaskan oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian.

b. Uji signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t merupakan analisis untuk mengetahui signifikan koefisien regresi sekaligus menguji hipotesis yang diajukan. Uji t digunakan untuk menguji signifikan hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Agar hasil regresi yang diperoleh dapat dijelaskan hubungannya, maka hasil regresi tersebut akan diuji menggunakan uji t dengan derajat kepercayaan 0,005%. Suatu variabel dikatakan berpengaruh ketika nilai signifikan yang diperoleh lebih kecil dari 0.005%. adapun hasil uji t dalam persamaan regresi sederhana sebagai berikut..

Tabel 4.13. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	
		B		Beta	t
1	(Constant)	33,692	2,666		12,639
	Dana Desa	,327	,074	,292	4,406
					Sig.

a. Dependent Variable: Pembangunan Ekonomi

Sumber: Output SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.13s jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka hipotesis diterima. Dari hasil perhitungan t_{hitung} sebesar 4,406 dibandingkan dengan t_{tabel} yaitu 1.652 dengan taraf signifikan 0,005 (5%) $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi. Sehingga dari hasil pengujian hipotesis terbukti bahwa terdapat pengaruh Dana Desa terhadap Pembangunan Ekonomi di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

4.2 Pembahasan

Mengingat konsekuensi dari pemeriksaan informasi, penelitian ini melihat dampak dari Aset Kota (DD) pada peningkatan keuangan di Kota Tana Lili Lokal, Pemerintah Luwu Utara dengan spekulasi bahwa Aset Kota Mempengaruhi Kemajuan Moneter di kota Tana Lili Daerah, Rezim Luwu Utara. Nilai (R) analisis korelasi sebesar 0,085 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pembangunan ekonomi dengan Dana Desa. Selanjutnya arah hubungan tersebut signifikan karena nilai r signifikan yang menunjukkan bahwa semakin besar jumlah Dana Desa yang baik maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya pembangunan ekonomi di desa Kecamatan Tana Lili. Akibatnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis (H_a) benar. Nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,085 menunjukkan bahwa 8,5% variasi tersebut disebabkan oleh variasi jumlah dana yang tersedia di desa, sedangkan 5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti.

Dari hasil uji t diketahui bahwa Town Assets berpengaruh signifikan terhadap Framework Improvement. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t sebesar 4,406 sedangkan t tabel sebesar 1,652 pada derajat besar 0,005 (5%) yang berarti H_a diakui.

Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar yang menyatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar sejalan dengan temuan penelitian ini. belajar (Marselina Ara Lili, 2018).

Hal ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Khatimah, 2020) Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan yang dilakukan oleh aparat desa sudah sangat bagus dan membantu masyarakat Gampong Lambeugak untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan. Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat belum maksimal karena program yang dilakukan di Gampong Lambeugak terfokuskan untuk lelaki saja sedangkan untuk perempuan tidak ada program khusus untuk pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu penggunaan dana desa di Gampong Lambeugak belum sepenuhnya dapat mencapai kemaslahatan bagi umat.

Hasil observasi yang didapatkan menunjukkan bahwa dengan adanya Dana desa memberikan manfaat dan perubahan untuk Desa-desa yang ada di Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara. Dengan adanya Dana desa ini terdapat banyak perubahan pembangunan yang terjadi di desa-desa di Kecamatan Tana Lili sehingga masyarakat sekarang dengan mudah mengakses kegiatan sehari-harinya. Dengan demikian, adanya dana desa merupakan kebijakan yang tepat dalam perubahan pembangunan di desa-desa seperti desa Karondang desa Rampoang dan desa-desa lainnya yang ada di kecamatan tana lili.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variable Dana desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Ekonomi, dimana dengan adanya dana desa yang baik dapat mempengaruhi besarnya peningkatan pembangunan ekonomi yang ada di Desa di Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana desa menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan Ekonomi. Dengan adanya anggaran dana desa ini terdapat banyak perubahan pembangunan yang terjadi di desa desa yang ada di Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara sehingga masyarakat sekarang dengan mudah mengakses kegiatan sehari-harinya. Sehingga dana desa yang di anggarkan oleh pemerintah merupakan kebijakan yang tepat dalam perubahan pembangunan di desa-desa khususnya desa-desa yang ada di kecamatan tana lili, kabupaten luwu utara.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang di ajukan penulis adalah: Perlu diadakannya sosialisasi terbuka yang dilakukan oleh Pemerintah desa desa di kecamatan tana lili agar masyarakat mengetahui anggaran pengelolaan dana desa yang akan dikelola untuk pembangunan ekonomian desa, sehingga masyarakat juga bisa berperan aktif dalam pembangunan desa yang lebih maju lagi, dan masyarakat diharapkan mampu memberikan kontribusi materi dan formal untuk kemajuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. F. (2019). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa Mamampang Di Kabupaten Gowa. In *Skripsi* (Vol. 3, hal. 1–73).
- Arina, A. I. S., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41.
- Banurea, Dina. Mahmuddin. 2018. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Volume 3, Nomor 1
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Dewi, S. S. (2021). *Analisis Dampak Dana Desa terhadap Pembangunan Wilayah di Kabupaten Klaten*.
- Ghozali, Imam. (2011). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jumiati, E., & Adam, D. (2020). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Perekonomian Masyarakat , Perluasan Lapangan Kerja dan Peluang Usaha Masyarakat Desa (Studi Deskriptif Korelasi pada 10 Desa di Kabupaten Purwakarta). *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 1(2), 195–210.
- Khatimah, H. (2020). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar) Disusun. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 25(1), 1–9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2014.12.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.03.034><https://www.iiste.org/Journals/index.php/JPID/article/viewFile/19288/19711><http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.678.6911&rep=rep1&type=pdf>
- Nadia, E. (2021). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat*. 1–10.
- Pamungkas, B. D. (2020). Penggunaan Dana Desa Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 21(1), 1–9.
- Simbolon, A. S. (2019). *Manfaat Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Simalungun (Studi Kasus : Kecamatan Raya)*.

- Sintia, E. D. (2019). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara). In *Skripsi*.
- Tobing, A. L., Simangunsong, R., & Siagian, N. (2021). Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Kecamatan Siantar Narumonda melalui Pemberdayaan Masyarakat. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 916–924. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.369>